

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya mutu dan akhlak merupakan tuntutan bagi setiap kehidupan manusia. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu)”¹. Mutu adalah “Ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”². Adapun akhlak, “Makna akhlak seiring dengan kata etos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak, karakter, sikap, dan kebiasaan”³. Berdasarkan pendapat Muhaimin maka dapat disimpulkan akhlak adalah sikap, watak, karakter, prilaku yang dibiasakan seseorang.

Tuntutan mutu berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir, peradaban, dan perkembangan zaman. Pemahaman tentang konsep kualitas awalnya banyak dibahas dalam dunia industri dan/atau perusahaan, sebagaimana dinyatakan bahwa ”Perusahaan Ricoh sejak pertengahan tahun 1970-an telah menerapkan konsep kualitas yang berfokus pada pasar (pelanggan) dan memenangkan medali (*deming prize*) suatu bentuk penghargaan paling bergengsi di Jepang”⁴. Seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kajian tentang kualitas banyak dibahas dalam dunia pendidikan.

¹Tim Sinar Grafika, *UU Sisdiknas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.

²Lukman Ali, *Kmas Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h.677

³Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Medi Group, 2012), Cet. Ke- 4, h. 8

⁴M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h. 22

Sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni tersebut, sudah saatnya praktisi pendidikan Islam untuk menciptakan lembaga pendidikan Islam yang bermutu, untuk mengikuti laju perkembangan yang terjadi di era global yang terjadi persaingan secara kompetitif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya :

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Ali-Imran : 139) ”⁵.

Ayat tersebut sesuai asbabun nuzulnya berkaitan dengan motivasi Allah terhadap umat Islam menghadapi musuh (perang Uhud). Secara kontekstual ayat tersebut memberi motivasi kepada umat muslim agar mempunyai jiwa yang kuat, aktif, kreatif dan inovatif baik secara jasmaniah maupun ruhaniyah dalam menjalani kehidupan sehingga hidupnya lebih berkualitas dan bermartabat. Demikian pula pengelola pendidikan di madrasah harus dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh agar mutu pendidikan di madrasah lebih baik.

Berlandaskan ayat tersebut praktisi lembaga pendidikan Islam harus melakukan perubahan dan inovasi sedemikian rupa dalam rangka menciptakan pendidikan Islam yang bermutu.. “Apa yang dituju oleh perubahan dan inovasi itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga

⁵Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1984), h.494

masing-masing madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak sekadarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu)”⁶.

Pemahaman dan persepsi dalam hal mutu ini, terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya sudut pandang antara pakar satu dengan pakar lainnya.

Pertama sebagian orang, bahkan umumnya para orang tua mengatakan bahwa kenyamanan sekolah itu merupakan salah satu tolak ukur terbaik,... ke dua pihak lain berpendapat bahwa hasil belajar atau hasil akademiklah yang menunjukkan sekolah tersebut menunjukkan sekolah yang baik karena menurut pendapat ini dari buahnya adalah anda mengenali mereka, ketiga sebagian orang mengemukakan bahwa ada beberapa ciri atau tolak ukur yang akan memperlihatkan mutu suatu sekolah⁷.

Pandangan tersebut, sepertinya berbeda dengan pandangan Mujamil yang menyatakan bahwa “Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan”⁸. Menurut Sardi standar mutu pendidikan sesuai ISO 9001 : 2008 adalah sebagai berikut :

1. Komponen standar isi, sasaran mutu :
 - a. Pengembangan KTSP berdasarkan guru mata pelajaran, Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI), konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara pendidikan
 - b. Lebih dari 76 % Silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman penyusunan KTSP
 - c. Sekolah memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik yang meliputi bimbingan, konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler.

⁶Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25

⁷Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*, (Jakarta : Lembaga Indonesia Aditiya, 2000), H. 213

⁸Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2007), h. 206

2. Komponen standar proses, sasaran mutu :
 - a. Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan yang telah
 - b. 76 % guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi IT
 - c. 76 % siswa dapat melakukan prakerin sesuai kompetensinya
 - d. Hasil evaluasi guru semuanya baik
3. Komponen standar kompetensi lulusan, sasaran mutu :
 - a. Rata-rata Hasil Ujian Nasional dan Uji Kompetensi keahlian
 - b. KKM kelas X dan kelas XI
 - c. Layanan terhadap siswa untuk memperoleh berbagai macam keterampilan sesuai pedoman
4. Komponen standar pendidik dan kependidikan, sasaran mutu :
 - a. Meningkatkan kualifikasi PTK
 - b. Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK
5. Komponen standar sarana dan prasarana, sasaran mutu :
 - a. Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia
 - b. Menambah sarana dan prasarana
6. Komponen standar pengelolaan, sasaran mutu :
 - a. Semua unsur terlibat dalam kerja tim pengembangan
 - b. RKS/RAKS seratus persen berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
 - c. Sistem informasi dengan menggunakan website /softcopy
7. Komponen standar pembiayaan, sasaran mutu :
 - a. Sekolah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu
 - b. 95 % penggunaan anggaran sesuai dengan rencana
 - c. 90% siswa membayar SPP tepat waktu
8. Komponen standar penilaian, sasaran mutu :
 - a. 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan
 - b. Ada penilaian peserta didik bidang akademik maupun nonakademik
 - c. Seluruh hasil penilaian siswa di dokumentasikan”⁹.

Perbedaan persepsi tentang mutu pendidikan merupakan hal wajar, karena masing-masing pihak mendefinisikannya dari sudut pandang dan kemampuan dalam menganalisis yang beragam.

Madrasah semestinya menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. “Ironisnya justru madrasah dipandang sebagai sekolah nomor dua dan

⁹Sardi, *Bahan Ajar Penyusunan Bisnis Proses Kebijakan Mutu sasaran Mutu*, (Yogyakarta : Pusat Pengembangan dan pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya, 2012), h. 44

sebagai alternatif apabila tidak diterima di sekolah umum”¹⁰.

Adanya beberapa tantangan yang dihadapi madrasah baik yang internal maupun eksternal. Dari segi internal tantangan yang dihadapi adalah menyangkut : a. Mutu; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah belum melahirkan lulusan yang berkualitas, b. Pendidik; sebagian besar pendidik dan kependidikan belum berkualitas sesuai dengan tuntutan perundang-undangan, c. Kurikulum; sebagian besar madrasah belum mengimplementasikan standard isi dan belum sepenuhnya dapat mencapai standard kompetensi lulusan minimal. Lulusan UN menggembirakan kurang lebih 92%, tetapi nilai rata-rata masih rendah, c. Manajemen ; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah yang 91,4% swasta, umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional”¹¹.

Kurang diminatinya madrasah oleh masyarakat karena kebanyakan madrasah belum dikelola dengan manajemen yang baik. Kondisi yang demikian juga dialami di sebagian besar madrasah kabupaten Lampung Tengah, terutama madrasah swasta. Untuk MTsN telah berkembang dengan mutu lebih baik karena didukung SDM dan sarana prasarana yang lebih memadai.

Berdasarkan survey pendahuluan di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah didapatkan data sebagai berikut :

“Data akhir sampai Juni 2014 ada 94 MTs di kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 2 MTs Negeri dan 92 MTs swasta. Dari 92 MTs swasta, 44 terakreditasi B, 30 terakreditasi C, dan 18 belum terakreditasi. Dari 92 MTs swasta baru ada 6 MTs yang menunjukkan adanya perkembangan madrasah bila ditinjau dari jumlah peserta didik yaitu MTs Ma’arif 02 Kotagajah jumlah peserta didik 874, MTs Nurul Qodiri Waypengubuan jumlah peserta didik 733, MTs Bustanul Ulum Jayasakti jumlah peserta didik 662, MTs Ma’arif 4 Rumbia jumlah peserta didik 591, MTs Ma’arif 22 Kalidadi jumlah siswa 564, dan MTs Roudlotus Solihin Purwosari jumlah peserta didik 557”¹².

¹⁰E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), h.21

¹¹Muhaimin, *Rekonstruksi, Op. Cit.*, h. 23-24

¹²Mapenda, *Data MTs Negeri/ Swasta Kabupaten Lampung Tengah* (Gunungsugih : Kementerian Agama, 19 Juni 2014), h. 20.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa MTs kabupaten Lampung Tengah baru terakreditasi B/C bahkan beberapa madrasah belum terakreditasi. Kondisi yang demikian karena kebanyakan madrasah belum dikelola secara profesional, keterbatasan SDM dan keterbatasan sumber dana.

“Pada umumnya belum profesionalitas dalam manajemen madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumber daya internal, baik dalam pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, SDM, sumber dana, sarpras yang memadai sehingga sebagian besar proses dan hasil pendidikan masih perlu ditingkatkan kualitasnya”¹³.

Kondisi yang demikian juga dapat diketahui pada analisis berikut :

Tabel 1

Analisis Kekuatan dan Kelemahan 8 Standar Nasional Pendidikan di MTs Swasta Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2013/2014

STANDAR	KEKUATAN	KELEMAHAN
Isi	Ada dokumen KTSP	82% KTSP belum dikembangkan oleh TPK
Proses	77% guru melakukan pembelajaran. 80% guru membuat RPP,	Baru 15% guru melakukan pembelajaran berbasis TIK 45% guru mengajar berdasarkan RPP.
SKL	Kelulusan 100% Kenaikan kelas 100% 70% akhlak siswa baik	Nilai rata-rata dan mutu lulusan rendah 30% akhlak siswa tercela
Pendidik dan Kependidikan	5% guru berstrata S.2 72% guru berstrata S.1 10% guru berstrata D.2	13% guru berlatar belakang SMA/Ponpes 100% guru belum PTK
Sarana dan Prasarana	70% Ruang Kelas memenuhi standar minimal	85% Ruang perpustakaan belum representative
Pengelolaan	60% unsur madrasah terlibat dalam tim	80% manajemen mutu madrasah tdk profesional
Pembiayaan	Gaji guru dan karyawan 75% tepat waktu	Keterbatasan dana pemeliharaan sarpras
Penilaian Pendidikan	100% guru memberikan penilaian peserta didik	Rendahnya penilaian proses dan analisis

Sumber data : Dokumen Analisis Laporan Pengawas madrasah kabupaten Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014

¹³Muhaimin, *Rekonstruksi, Op. Cit.*, h. 22

Berdasarkan pendapat dan analisis tersebut kurang bermutunya pendidikan di madrasah secara umum diduga disebabkan kurang efektifnya dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan profesionalisme pendidik dalam mengembangkan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak.

Rendahnya mutu MTs Swasta di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2013/2014 berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan tersebut ketua Pokjawas menghimbau “Pengawas madrasah berperan aktif untuk mendorong dan mengadakan pendampingan dalam pengembangan madrasah sehingga mutu madrasah semakin meningkat dengan tetap mengedepankan akhlak yang baik sebagai ciri khas madrasah”¹⁴

Kepala madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu melakukan perencanaan pendidikan secara sistematis, melakukan sosialisasi, motivasi, dan pengawasan agar terlaksananya kegiatan sesuai juknis, dan melakukan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. “Konsep manajemen mutu pendidikan dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : “(1) Membuat putusan, (2) Merencanakan, (3) Mengorganisasikan, (4) Mengkomunikasikan, (5) Mengkoordinasikan, (6) Mengawasi, (7) Menilai”¹⁵. “RKM ada, namun kebanyakan hanya untuk kelengkapan RKM, dan selama ini belum disosialisasikan kecuali yang akan dilakukan”¹⁶. “RKM ada dan disusun berdasarkan hasil musyawarah wali murid, Komite Madrasah, dewan guru, dan yayasan yang pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas

¹⁴Suwignyo, Ketua Pokjawas Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, Gunungsugih tgl. 17 Juni 2014

¹⁵R. Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 230

¹⁶Rohman, Kepala Tata Usaha MTs Bustanul Ulum Sridadi, *Wawancara*, Sridadi tgl. 19 Juni 2014

yang ada di RKM”¹⁷. Berdasarkan hasil survey tersebut dapat diduga sebagian madrasah swasta kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatan belum diatur dengan baik berdasarkan RKM yang disusun, terkecuali MTs Ma’arif 20 Kalidadi.

Manajemen pengembangan kurikulum diperlukan Tim Pengembang Kurikulum. “Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama Tim Pengembang Kurikulum berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP¹⁸”. “Di MTs Ma’arif 22 Bangunrejo belum dibentuk TPK, KTSP yang dimiliki merupakan hasil kreatifitas waka kurikulum dan RPP masih sebatas untuk melengkapi persiapan akreditasi”¹⁹. “KTSP telah disiapkan oleh kepala madrasah, selaku waka kurikulum saya tidak pernah diajak untuk mengadakan pengembangan kurikulum, adapun guru-guru terutama yang masih muda-muda membuat RPP, meskipun mereka copy paste”²⁰. “Tim Pengembang Kurikulum kami telah berusaha mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan kondisi masyarakat, visi dan misi ”²¹. Dari keterangan tersebut dapat diduga bahwa manajemen dalam hal standard isi tergolong rendah. Baru sebagian kecil manajemen standar isi di MTs swasta yang telah dikelola dengan baik seperti MTs Ma’arif 02 Kotagajah.

¹⁷Syarifudin, Kepala MTs Ma’arif 20 Kalidadi, *Wawancara*, (Kalidadi tgl. 19 Juli 2014

¹⁸Lampiran Permendiknas No. 12 Tahun 2009, *Perangkat Akreditasi SMP/MTs* (Jakarta : BAN-S/M, 2009), h. 1

¹⁹Toha, Kepala MTs Ma’arif 22 Bangunrejo, *Wawancara*, Bangunrejo tgl. 23 Juli 2014
Waluyo Sejati, Kepala MTs Bustanul Ulum Jayasakti, *Wawancara*, Jayasakti tgl. 20 Juli 2014

²⁰Ladi, Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTs Nurul Ulum Payungrejo, *Wawancara*, Payungrejo tgl. 22 Juli 2014

²¹Junaedi, Waka Kesiswaan MTs Ma’arif 02 Kotagajah, *Wawancara*, Kotagajah tgl. 2 Agustus 2014

Untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas dibutuhkan perpustakaan yang memadai. “Tiap sekolah/ madrasah tersedia buku tek 1 buku/mata pelajaran/siswa, dan 2 buku/mata pelajaran/ sekolah, buku pengayaan 870 judul/sekolah”²². Pada umumnya perpustakaan di madrasah swasta belum memenuhi standar pelayanan minimal, hanya sebagian kecil madrasah yang terpenuhi standar pelayanan minimal. “Ruang perpustakaan standar ukuran 8 X 7 m dilengkapi meja kursi baca, Buku-buku cukup memadai, siswa antusias membaca buku diperpustakaan,”²³. “Ruang perpustakaan bergabung dengan ruang tatausaha, tidak tersedia meja kursi baca, tidak ada buku daftar peminjam karena buku dipinjamkan dan dikoordinir guru bidang studi”²⁴. “Dikala istirahat mayoritas peserta didik ke kantin dan bermain, hanya beberapa peserta didik yang mau memanfaatkan waktu istirahat atau jam-jam kosong untuk membaca buku di perpustakaan”²⁵. Berdasarkan catatan observasi dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana perpustakaan diduga baru sebagian kecil madrasah yang telah dikelola dengan baik sebagian besar perpustakaan di MTs swasta belum dikelola dengan baik.

Kondisi yang demikian menjadi tantangan praktisi pendidikan Islam baik ditingkat penentu kebijakan pendidikan baik tingkat pusat maupun daerah, maupun pengawas pendidikan di madrasah untuk dapat mendorong pengelola madrasah dengan manajemen mutu berbasis akhlak.

²² Lampiran Permendiknas No. 12 Tahun 2009, *Op. Cit.*, h. 22

²³ Warisno, *Perpustakaan MTs Ma'arif 02 Kotagajah, Observasi*, Kotagajah tgl. 21 Juli 2014

²⁴ Warisno, *Perpustakaan MTs Ma'arif 20 Kalidadi, Observasi*, Kalidadi tgl. 23 Juli 2014

²⁵ Harmonis, *Pustakawan dan guru Akidah Akhlak MTs Nurul Ulum Payungrejo, Wawancara*, Payungrejo tgl. 22 Juli 2014

Sesuai dengan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah”²⁶. Amanat tersebut memberikan peluang madrasah agar melakukan langkah-langkah yang tepat mengembangkan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak. Hal ini sesuai dengan visi madrasah “Visi mikro pendidikan madrasah adalah terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, trampil dan profesional, sesuai dengan tatanan kehidupan”²⁷.

Manajemen mutu berbasis akhlak telah docontohkan oleh sahabat Usman bin Affan dalam mengelola sumur dan kebun kurma, hingga hotel.

Wakaf Usman bin Affan terus berkembang. Bermula dari Bir Rumah (sumur rumah) terbaik milik Yahudi pelit dibeli Usman lalu mewakafkannya untuk keperluan kaum Muslimin. Wakaf Usman berkembang menjadi kebun kurma yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Uang panen kurma dibagi dua yaitu untuk anak yatim/ fakir miskin, dan disimpan di bank dengan rekening atas nama Usman bin Affan yang dipegang oleh Kementerian Wakaf. Kekayaan yang tersimpan di bank terus bertambah digunakan untuk membeli tanah dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah tersebut sekarang dibangun hotel berbintang lima dengan dana dari ‘rekening’ Usman. Hotel disewakan dengan *Income* tahunan mencapai lebih 50 juta Riyal (sekitar Rp. 16 Milyar). Pengelolaan penghasilan separuhnya untuk anak yatim dan fakir miskin, separuhnya disimpan di ‘rekening’ Usman bin Affan.²⁸

Inti kisah tersebut mulai dari pembelian sumur, kebun kurma, hingga pembanguna hotel dikelola dengan manajemen mutu berbasis akhlak.

²⁶ Tim Sinar Grifika, *Op. Cit.*, h. 26

²⁷ Ahmad Jayadi, Aceng Abdul Aziz, *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta : Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), h.53

²⁸ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Madinah*, (Madinatul Munawaroh : K.S.A, 2005), h. 132

Teori manajemen mutu memulai babak baru dalam bidang pendidikan, yang hingga saat ini para tokoh masih terdapat perbedaan pandangan tentang manajemen mutu. Perbedaan pandangan terjadi dalam hal sasaran mutu, standar mutu, penentu mutu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini.

Manajemen berbasis akhlak telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. “Nabi Muhammad SAW bersikap kepada semua orang dengan penuh santun, wajah ceria, dan akhlak mulia, hingga beliau menjadi seorang bapak bagi mereka. Bagi Nabi Muhammad SAW, mereka semua adalah sama dalam kebenaran, kebaikan, dan ketakwaan”²⁹. Pendapat tersebut secara tekstual tidak menyebut istilah manajemen akhlak, namun secara kontekstual tersirat adanya karakteristik manajemen akhlak nabi Muhammad SAW.

Kurikulum di madrasah berisi materi pelajaran dan materi-materi lain yang relevan dengan kebutuhan.

“Kurikulum yang dirancang tidak hanya berisikan berbagai materi dan mata pelajaran saja, tetapi diwarnai oleh beberapa kegiatan untuk dapat mengembangkan nilai-nilai yang menjadi pilar madrasah tersebut. Proses ini pada akhirnya akan menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai yang unggul yang mungkin akan berbeda dengan lulusan-lulusan sekolah/ madrasah lain”³⁰.

Meskipun secara tekstual Muhaimin tidak menyebutnya dengan istilah manajemen mutu dan akhlak dalam kurikulum, namun isi pendapat tersebut secara kontekstual menekankan adanya pengembangan kurikulum melalui

²⁹Muhammad Abdul Jawwad, *Rahasia Sukses Manajemen Rosululloh*, (Surakarta : Ziyad Visi Media, 2009), h. 64

³⁰Muhaimin, Suti'ah, Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dan Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 62

manajemen mutu berbasis akhlak sehingga madrasah lebih bermutu dan bermartabat.

Berdasarkan latar belakang baik secara teoretis maupun empiris, sebagian besar MTs swasta kabupaten Lampung Tengah belum dikelola dengan manajemen yang baik. Meskipun demikian ternyata ada MTs swasta yang berkembang dengan baik yang diduga telah dikelola dengan manajemen mutu berbasis akhlak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Madrasah melalui manajemen Mutu Berbasis Akhlak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Analisis di MTs Swasta Kabupaten Lampung Tengah) ”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang muncul di MTs swasta Kabupaten Lampung Tengah jika diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran surat Ali-Imran ayat 139 dan UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, namun umumnya MTs swasta kabupaten Lampung Tengah belum bermutu.
- b. Belum bermutunya madrasah karena kepala madrasah yang diberi amanat belum mengelola dengan manajemen yang baik.
- c. Sebagian besar pendidik telah memenuhi kualifikasi pendidikan, namun belum semuanya menjalankan tugas secara profesional.
- d. Tersedianya sarana prasarana pendidikan, namun belum dikelola secara efisien dan efektif.

- e. Sebagian besar pendidik memiliki administrasi pembelajaran, namun sebagian besar belum diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
- f. Sumber dana pendidikan cukup banyak namun belum digali dan dikelola secara profesional.
- g. Kelulusan dan kenaikan kelas 100%, namun nilai rata-rata masih sedang.
- h. Adanya perbedaan sudut pandang tentang standar mutu pendidikan.

2. Pembatasan Masalah

Berbagai masalah yang ada di MTs swasta Kabupaten Lampung Tengah, namun dalam penelitian ini peneliti batasi pada permasalahan :

- a. Upaya meningkatkan mutu madrasah sesuai amanat Al-Qur'an dan UU No 20 tahun 2003
- b. Strategi peningkatan mutu madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dengan 5 aspek yaitu manajemen peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, personalia, dan manajemen keuangan.
- c. Lokasi penelitian di MTs Ma'arif 02 Kotagajah, MTs Ma'arif 20 Kalidadi, dan MTs Bustanul Ulum Jayasakti Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015.
- d. Kriteria mutu pendidikan berpedoman pada penilaian 8 SNP

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Ma'arif 02 Kotagajah, MTs Ma'arif 20 Kalidadi dan MTs Bustanul Ulum Jayasakti Kabupaten Lampung Tengah?

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi sub rumusan masalah yang lebih terfokus pada :

1. Bagaimanakah perencanaan strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
3. Bagaimana evaluasi strategi pengembangan madrasah dengan manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Secara spesifik tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan perencanaan strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Untuk menemukan pelaksanaan strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. Untuk menemukan evaluasi strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan.

4. Untuk membuktikan apakah strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dapat meningkatkan mutu pendidikan ?

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Pengembangan hasanah pengetahuan dan refrensi pengembang pendidikan
2. Menjadi refrensi peneliti-peneliti lain

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Meningkatkan profesionalitas manajemen pengelolaan madrasah
2. Meningkatkan mutu madrasah berbasis akhlak

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Yusuf Bahtiar dalam penelitiannya yang berjudul "Kesiapan Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah di Kota dan Kabupaten Bandung menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah baik menurut pandangan para ahli maupun praktisi pendidikan sampai saat ini belum dapat dibantah tentang kebaikan dan keuntungannya.
- b. Kesiapan pelaksanaan MPBS pada Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat (orang tua) dari jenjang SD, SLTP dan SMU di kota dan kabupaten Bandung dilihat dari segi organisasi, sarana prasarana, pembiayaan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan termasuk pada kategori cukup siap³¹.

Yusuf dan peneliti sama-sama meneliti implementasi manajemen sekolah/madrasah. Perbedaannya Yusuf memilih objek penelitian di sekolah dengan fokus kesiapan implementasi MPBS ditinjau dari segi organisasi, sarana prasarana, pembiayaan, partisipasi masyarakat di kota Bandung. Sedangkan

³¹Yusuf Bahtiar, *Kesiapan Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah di Kota dan Kabupaten Bandung*, (UPI, 2001), h. 217

peneliti memilih objek penelitian di madrasah dengan fokus strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan yang terdiri dari 9 strategi pengembangan komponen dasar pendidikan di MTs swasta kabupaten Lampung Tengah.

Ahmad Syafi'i dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan Model Madrasah Aliyah Keagamaan Unggulan", menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah yang mengarah pada perbaikan mutu secara berkesinambungan diperlukan
- b. seperangkat sistem yang terintegrasi dan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan calon ulama yang mampu melayani umat maka Madrasah Aliyah Keagamaan harus dibangun berdasarkan visi-misi serta strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³²

Ahmad Syafi'i dan peneliti sama-sama meneliti strategi pengembangan madrasah. Perbedaannya Syafi'i memilih objek pada Madrasah Aliyah Keagamaan Unggulan yang berada di madrasah negeri, sebagian besar dana operasional dari pemerintah, sedangkan peneliti memilih objek penelitian di Madrasah Tsanawiyah swasta yang masih dalam taraf pengembangan dengan dana operasional sebagian besar dari masyarakat.

I Gede W. Aryasuda dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah, menyimpulkan :

- a. Implementasi kebijakan MBS didukung oleh adanya kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-prasarana di sekolah, baik secara kuantitas maupun kualitas, ditambah oleh peran dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders.

³² Ahmad Syafi'i, *Strategi Pengembangan Model Madrasah Aliyah Keagamaan Unggulan*, (Malang, UIN, 2003), h. 2011

- b. Kualitas implementasi kebijakan MBS sangat dipengaruhi oleh peran kepala sekolah yang menggunakan prinsip kearifan lokal³³

Aryasuda dan peneliti sama-sama meneliti manajemen berbasis sekolah/madrasah. Perbedaanya Aryasuda fokus penelitiannya pada kesiapan implementasi MBS dengan prinsip kearifan lokal, sedangkan peneliti fokus penelitiannya pada strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan.

F. Kerangka Pikir

Sesuai dengan kebijakan Direktur Madrasah “Ada tiga desain besar pengembangan pendidikan madrasah : (1) Madrasah Unggulan, (2) Madrasah Model, dan (3) Madrasah Kejuruan dan Reguler”³⁴. Madrasah unggulan, madrasah model dan madrasah kejuruan dikembangkan di madrasah negeri yang jumlahnya masih terbatas. Madrasah reguler dikembangkan di madrasah negeri maupun swasta. Kondisi demikian dikarenakan terbatasnya anggaran pendidikan di kementerian agama sehingga sampai saat ini pendidikan madrasah mayoritas dikelola swasta yang pengembangannya mengikuti desain reguler.

Strategi pengembangan madrasah perlu dirancang sehingga mampu menghasilkan perubahan sesuai dengan visi misi dan tujuan madrasah. “Strategi pengembangan madrasah dilakukan dengan 5 strategi pokok yaitu :

- 1). Peningkatan layanan pendidikan di madrasah;
- 2). Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah;
- 3). Peningkatan mutu dan

³³I Gede W. Aryasuda. *Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2011), h. 245

³⁴Ahmad Jayadi, Aceng Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h.53

relevansi pendidikan; 4). Pengembangan sistem dan manajemen pendidikan; 5). Pemberdayaan kelembagaan madrasah”³⁵. Implementasi strategi pengembangan madrasah tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi madrasah. “MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing”³⁶.

Pada umumnya MTs swasta Kabupaten Lampung Tengah memiliki visi misi peningkatan mutu dan akhlak. “Visi madrasah Optimal dalam prestasi, unggul dalam budi pekerti, Misi madrasah meningkatkan daya serap/ mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, menyelenggarakan pendidikan agama Islam sehingga terbina siswa yang memiliki wawasan keislaman dan berakhlak mulia”³⁷. Rumusan visi misi tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang NO. 20/2003 tentang Sisdiknas bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”³⁸. Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas dan visi misi tersebut diperlukan pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak.

Kementerian Agama melalui kebijakan program Mapenda menawarkan 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu madrasah. “Kebijakan program Mapenda untuk meningkatkan mutu relevansi madrasah, meliputi 4 (empat) aspek, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana

³⁵*Ibid.*, h.38

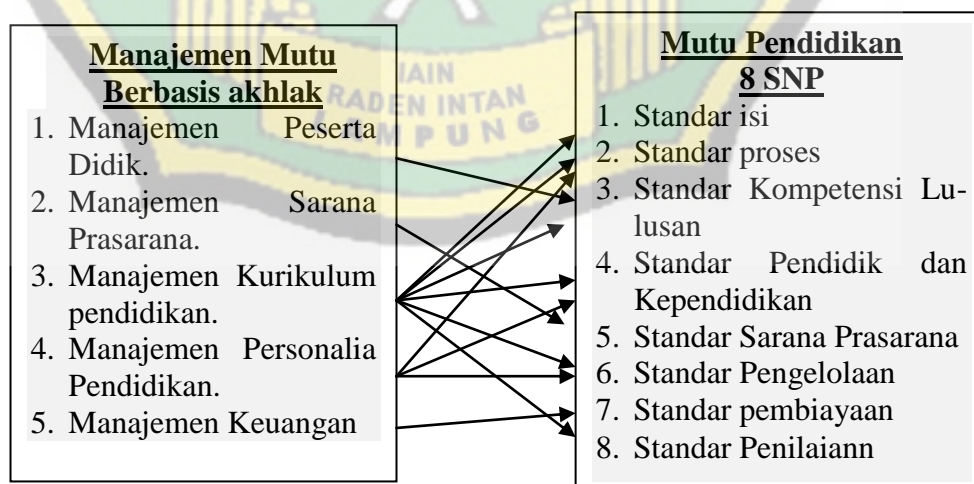
³⁶Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Grasindo, 2008), h.53

³⁷Subroto, *Profil MTs Ma'arif 02 Kotahajah*, (Kotagajah : Dokumentasi MTs Ma'arif 02, 2014), h.5

³⁸E.Mulyasa, *Op. Cit.*, h.11

pendidikan, serta kepemimpinan madrasah”³⁹. Berdasarkan pendapat Mujamil “Manajemen komponen-komponen dasar pendidikan yang mutlak harus ada dalam proses peningkatan mutu pendidikan yaitu (1) Manajemen personalia pendidikan, (2) Manajemen kesiswaan, (3) Manajemen kurikulum pendidikan, (4) Manajemen keuangan pendidikan, (5) Manajemen sarana prasarana pendidikan⁴⁰. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti fokus meneliti 5 komponen dasar manajemen mutu pendidikan yaitu : 1) Manajemen peserta didik, 2) Manajemen sarana prasarana, 3) Manajemen kurikulum pendidikan, 4) Manajemen personalia pendidikan, dan 5) Manajemen keuangan. Harapannya dengan manajemen lima komponen dasar pendidikan tersebut dapat mengembangkan madrasah menjadi madrasah yang bermutu tinggi.

Kerangka pikir strategi pengembangan madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut. :



³⁹Ahmad Jayadi, Aceng, *Op. Cit.*, h.40

⁴⁰Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 127

Gambar 1 : Strategi Pengembangan Madrasah melalui manajemen Mutu Berbasis Akhlak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menurut Surya Darma “Manajemen peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan menjadi alumni”⁴¹. Menurut Mujamil “Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan”⁴². Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen peserta didik adalah memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik meliputi pengenalan, pendaftaran, layanan individual, pengembangan kemampuan, minat, sehingga berkembang optimal potensi yang dimiliki mulai sejak masuk sampai menjadi alumni.

“Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti”⁴³. Dengan demikian manajemen sarana prasarana pendidikan adalah mempengaruhi orang lain untuk mengelola, mengatur segala perlengkapan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

Manajemen kurikulum menurut Mulyasa yaitu “Suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum”⁴⁴. Menurut Fitri manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah “Usaha sistematis yang

⁴¹Surya Dharma, *Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah*, (Jakarta : Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007),, h 1

⁴²Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 141

⁴³Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 171

⁴⁴Mulyasa, *Op. Cit.*, h. 40

dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilandasi nilai-nilai Islam agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien⁴⁵. Dengan demikian manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komprehensif, sistemik dan sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.

Menurut Pidarta manajemen personalia adalah “Memperhatikan orang-orang dalam organisasi mencakup merekrut, menempatkan, melatih, mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan”⁴⁶. Berdasarkan pendapat tersebut manajemen personalia pendidikan adalah mendayagunakan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sumber daya potensial meliputi merekrut, menempatkan, melatih, mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga berperan aktif dan maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Syarifudin “Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan”⁴⁷. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

⁴⁵Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 2

⁴⁶Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Renika Cipta, 2011), h. 113

¹⁰⁸Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hal: 41

Standar Mutu madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan diperlukan badan penjaminan mutu yang disebut Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Berdasarkan instrumen akreditasi SMP/MTs yang digunakan BAN-S/M terdapat delapan komponen yang dinilai yaitu :

“instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan:

- a. Komponen standar isi nomor 1 — 17.
- b. Komponen standar proses nomor 18 — 29.
- c. Komponen standar kompetensi lulusan nomor 30 — 49.
- d. Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 50- 75.
- e. Komponen standar sarana dan prasarana nomor 76 — 103.
- f. Komponen standar pengelolaan nomor 104 — 123.
- g. Komponen standar pembiayaan nomor 124 — 148.
- h. Komponen standar penilaian nomor 149 — 169”⁴⁸.

Komponen 8 Standar Nasional Pendidikan jika dikembangkan di madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dapat meningkatkan mutu pendidikan berbasis akhlak di madrasah

Sasaran akhlak diintegrasikan dalam kegiatan yang diprogramkan madrasah seperti contoh berikut :

Tabel 2

Indikator Akhlak

Prilaku Berakhlak	INDIKATOR
Taat kepada ajaran agama	Membiasakan melaksanakan ajaran agama, menyebut nama Allah pada saat gelisah, gembira, tertimpa musibah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
Toleransi	Hidup rukun dalam beragama, etnis, suku, mengucapkan salam kepada orang tua, guru, teman, dan orang lain

⁴⁸Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009

Prilaku Berakhlak	INDIKATOR
Disiplin	Datang sekolah tepat waktu, berpakaian rapih, memelihara fasilitas umum, melestarikan lingkungan, menjaga nama baik sekolah, tertib.
Etos kerja	Rajin belajar, mengerjakan PR
Tanggung jawab	Mengerjakan tugas sesuai petunjuk dan tepat waktu
Pengendalian diri	Tidak mudah tersinggung, menahan marah, tidak berbuat yang negative
Berpikir positif	Memberikan dukungan orang lain melakukan kebaikan
Cinta kasih sayang	Rela berkorban, membantu tanpa pamrih, member ucapan rasa suka atau duka dengan tepat
Kesetiakawanan	Pemaaf, adil, tolong menolong
Hormat menghormati	Menghormati yang lebih tua dan menyanyangi yang lebih muda
Jujur	Berbicara jujur, tidak mengambil hak orang lain, mengakui kesalahan sendiri. ⁴⁹

Konsep akhlak tersebut jika dikembangkan di madrasah melalui manajemen mutu berbasis akhlak dapat meningkatkan mutu pendidikan.

⁴⁹Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral & Budi pekerti dalam Prespektif Perubahan*, (Jakarta : Bumu Alsara, 2008), h. 255